



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL HASIL PENGABDIAN 2022

Tema: "Membangun Negeri dengan Inovasi Tiada Henti melalui Pengabdian kepada Masyarakat"

LP2M-Universitas Negeri Makassar, 26 November 2022

PKM Sosialisasi Desain Besar Olahraga Nasional di Isori Kabupaten Majene

Herman H.¹, Muh. Arifai² Reza Mahyuddin³ Muslim⁴

¹Prodi Pendidikan Keahlian Olahraga, Universitas Negeri Makassar

²Prodi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Wira Bhakti Makassar

³Prodi Pendidikan Keahlian Olahraga, Universitas Negeri Makassar

⁴Prodi Pendidikan Keahlian Olahraga, Universitas Negeri Makassar

Email: hermandody@unm.ac.id

Email : arifaimuh@wirabhaktimakassar.ac.id

Email: rezamahyuddin@unm.ac.id

Email: muslim@unm.ac.id

Abstrak. Mitra Program Kemitraan Masyarakat (PKM) ini adalah ISORI Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat. Masalahnya adalah: Para pelaku olahraga Kabupaten Majene belum memahami secara implisit muatan dan arah kebijakan tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional. Sasaran eksternal adalah Pengurus Ikatan Sarjana olahraga Republik Indonesia Kabupaten Majene (ISORI) harus mengambil peran yang strategis dalam mewujudkan tujuan dari DBON. Metode yang digunakan adalah: sosialisasi, diskusi, dan tanya jawab. Hasil yang dicapai adalah (1) mitra memiliki pengetahuan desain besar olahraga nasional, (2) Mitra memiliki kemampuan meningkatkan manajemen tata Kelola olahraga Prestasi, olahraga Pendidikan. (3) Mitra memiliki pengetahuan dalam memilih strategi menentukan skala prioritas utama dan prioritas kedua pada olahraga prestasi. (4) Mitra dapat memanfaatkan ruang terbuka hijau dilengkapi dengan sport center. (5) Mitra dapat mengembangkan kreatifitas sumber daya lokal dalam meningkatkan perekonomian daerah.

Kata kunci: sosialisasi, olahraga, DBON, ISORI

Abstract. The partner of this Community Partnership Program (PKM) is ISORI Majene Regency, West Sulawesi Province. The problem is: The sports players in Majene Regency have not implicitly understood the content and direction of the policy regarding the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 86 of 2021 concerning the Great Design of National Sports. The external target is that the Management of the Association of Sports Scholars of the Republic of Indonesia, Majene Regency (ISORI) must take a strategic role in realizing the goals of DBON. The methods used are: socialization, discussion, and question and answer. The results achieved are (1) partners have great design knowledge of national sports, (2) partners have the ability to improve the management of sports education governance. (3) Partners have knowledge in choosing strategies to determine the main priority scale and second priority in sports achievements. (4) Partners can take advantage of green open space equipped with a sports center. (5) Partners can develop the creativity of local resources in improving the regional economy.

Keywords: socialization, sports, DBON, ISORI

I. PENDAHULUAN

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) yang telah dilaksanakan bermitra dengan Ikatan Sarjana Olahraga Republik Indonesia Kabupaten Majene, Kabupaten Majene merupakan salah satu daerah Tingkat II Provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Pada hasil pekan olahraga daerah 2018 di Kabupaten Majene, sebagai tuan rumah menduduki peringkat ke 2 dari 6 kabupaten yang mengikuti ajang 4 tahun ini. Ikatan Sarjana Olahraga Republik Indonesia Kabupaten Majene harus mengambil peran yang

strategis dalam mengimplementasi kebijakan pemerintah pusat. Karena selama ini ISORI disetiap kabupaten kurang aktif dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan olahraga di daerah. Sementara harapan pemerintah pusat lewat kemententrian pemuda dan olahraga republik Indonesia semua pelaku olahraga harus terlibat secara aktif dalam melaksanakan kebijakan.

Dengan adanya kebijakan Desain Besar Olahraga Nasional adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan Desain Besar

Olahraga Nasional yang selanjutnya disingkat DBON adalah dokumen rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi, dan industri olahraga.

Kebijakan DBON merupakan solusi bagi peningkatan prestasi pada setiap tingkatan. Mulai dari kabupaten sampai tingkat internasional melalui berbagai kebijakan program strategis pada olahraga Pendidikan, olahraga rekreasi atau olahraga kebugaran dan olahraga prestasi serta industri olahraga. Dengan demikian segala perangkat pemerintahan, pelaku olahraga perlu mendukung kebijakan Desain Besar Olahraga Nasional agar mampu membangkitkan kejayaan olahraga di Indonesia secara menyeluruh dengan adanya DBON, maka olahraga prestasi, olahraga Pendidikan dan olahraga rekreasi di Indonesia merata pada setiap kabupaten. Kabupaten Majene diharapkan mampu menjalankan kebijakan DBON.



Gambar 1. Spanduk kegiatan PKM

Kondisi mitra sebagai berikut:

Para pelaku olahraga Kabupaten Majena belum memahami secara implisit muatan dan arah kebijakan tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional oleh karena itu salah satu penunjang keberhasilan kebijakan presiden dapat terealisasi dengan baik maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk melakukan sosialisasi terkait Desain Besar di Kabupaten Majene untuk

meningkatkan pengetahuan dan pentingnya DBON dalam menata kelola olahraga di setiap kabupaten. Pengurus Ikatan Sarjana olahraga Republik Indonesia Kabupaten Majene (ISORI) harus mengambil peran yang strategis dalam mewujudkan tujuan dari DBON.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Kebijakan

Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan.

Menurut (Muhadjir, 2000) kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan: By the law, social justice, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3) diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan (Muhadjir, 2000).

Kemudian Monahan dan Hengst seperti yang dikutip oleh Syafaruddin bahwa kebijakan (policy) secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu "Polis" yang artinya kota (city), (Wehrich & Koontz, 1993). Pendapat ini menjelaskan kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL HASIL PENGABDIAN 2022

Tema: "Membangun Negeri dengan Inovasi Tiada Henti melalui Pengabdian kepada Masyarakat"

LP2M-Universitas Negeri Makassar, 26 November 2022

dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

Kebijakan juga adalah rencana, kebijakan itu sebagai pernyataan atau pemahaman atau pengertian yang mengarahkan pikiran dalam membuat keputusan. Tidak semua kebijakan merupakan pernyataan, tetapi sering diimplikasikan dari tindakan menejer. Sementara (Wehrich & Koontz, 1993) mengatakan bahwa kebijakan adalah sebagai tuntunan dalam berfikir untuk mengambil keputusan, keputusan tersebut diambil dalam batas-batas. Keputusan memerlukan tindakan tetapi dimaksudkan untuk menuntut manager dalam memutuskan komitmen.

Berarti kebijakan berdasarkan pendapat ini adalah sebagai pedoman untuk menuntun manager dalam membuat keputusan komitmen. Untuk itu kebijakan yang dibuat dapat meliputi ruang lingkup yang sempit maupun luas. Oleh karena itu (Frederick et al., 1998) berpendapat bahwa kebijakan pada tingkat publik ditujukan kepada tindakan yang diambil pemerintah untuk mempromosikan perhatian umum (masyarakat) banyak kebijakan publik (umum) mulai dari pajak, pertahanan nasional sampai perlindungan lingkungan mempengaruhi bisnis secara langsung. Kebijakan publik dan program ini membuat perbedaan antara keuntungan dan kegagalan.

Lebih lanjut (Muhadjir, 2000) mengatakan bahwa kebijakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan substantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan substantif adalah keputusan yang dapat diambil berupa memilih alternatif yang dianggap benar untuk mengatasi masalah. Tindak lanjut dari kebijakan substantif adalah kebijakan implementatif yaitu keputusan-keputusan yang berupa upaya-upaya yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan substantif.

Secara empiris kebijakan berupa undang-undang, petunjuk, dan program, dalam sebuah Negara kebijakan dianggap sebagai rangkaian tindakan yang dikembangkan oleh badan atau pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu, diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku untuk memecahkan masalah tertentu.

B. Teori Implementasi

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2008) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (Solichin, 2008) mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program

dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

III. PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN

Mengacu pada permasalahan prioritas mitra, sebagai solusi mengatasi permasalahan yaitu Peningkatan pengetahuan dan Manajemen tata kelola olahraga pendidikan sebagai tempat pembinaan olahraga prestasi sejak dini, pada olahraga prestasi cara menentukan skala prioritas. Olahraga Prestasi di daerah sebagai penyangga prestasi di tingkat nasional dan internasional, pada olahraga rekreasi atau olahraga kebugaran pemanfaatan ruang terbuka hijau dilengkapi dengan sport center dalam beraktifitas fisik. Desain Besar Olahraga Nasional berfungsi untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota, ISORI, Organisasi Olahraga, Induk Organisasi Cabang Olahraga, dunia usaha dan industri, akademisi, media, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan Keolahragaan Nasional sehingga pembangunan Keolahragaan Nasional dapat berjalan secara efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan.

A. Pengenalan Desain Besar Olahraga Nasional

Pada tahapan ini, tim pengabdian mensosialisasikan kepada mitra mengenai gambaran umum desain besar olahraga nasional.



Gambar 2. Sosialisasi Desain Besar Olahraga Nasional

B. Peningkatan Manajemen tata Kelola olahraga pendidikan

Pada tahapan ini tim pengabdian menyampaikan cara peningkatan manajemen tata Kelola olahraga Pendidikan.



Gambar 3. Manajemen tata Kelola olahraga pendidikan

C. Strategi menentukan skala prioritas utama dan prioritas kedua pada olahraga prestasi

Pada tahapan ini, tim pengabdian melatih dan mendampingi mitra dalam pemilihan strategi dalam menentukan skala prioritas dalam olahraga prestasi.



Gambar 4. Strategi penentuan skala prioritas olahraga prestasi

D. Pemanfaatan ruang terbuka hijau dilengkapi dengan sport center

Pada tahapan ini, tim pengabdian mensosialisasikan bagaimana pemanfaatan ruang terbuka hijau yang dilengkapi dengan sport center di wilayah Sulawesi Barat.



Gambar 5. Pemaparan materi keempat

E. Membangun kreatifitas sumber daya lokal dalam meningkatkan perekonomian daerah

Pada tahapan ini, tim pengabdian melatih dan mendampingi mitra dalam membangun kreatifitasnya sumber daya lokal dalam peningkatan perekonomian daerah.



Gambar 6. Sosialisasi materi kelima

IV. KESIMPULAN

Hasil pelaksanaan kemitraan masyarakat dapat ditarik kesimpulan:

- a. Mitra memiliki pengetahuan desain besar olahraga nasional.
- b. Mitra memiliki kemampuan meningkatkan manajemen tata Kelola olahraga Pendidikan.

- c. Mitra memiliki pengetahuan dalam memilih strategi menentukan skala prioritas utama dan prioritas kedua pada olahraga prestasi.
- d. Mitra dapat memanfaatkan ruang terbuka hijau dilengkapi dengan sport center.
- e. Mitra dapat mengembangkan kreatifitas sumber daya lokal dalam meningkatkan perekonomian daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi yang telah memberikan hibah. Selanjutnya ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Rektor UNM atas arahan dan pembinaanya selama proses kegiatan Pengabdian Masyarakat berlangsung. Demikian pula ucapan terima kasih disampaikan kepada Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat UNM dan ISORI Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat yang telah memberi fasilitas untuk melakukan kegiatan PKM hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Presiden No 86 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional.
- Frederick, W. C., Davis, K., & Post, J. E. (1998). *Business and Society, Coeporate Strategy, Public Policy, Ethics, Sixth Edition*. McGraw-Hill Publishing Company.
- Muhadjir, N. (2000). *Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Raka Sarasin.
- Solichin, A. W. (2008). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara.
- Weihrich, H., & Koontz, H. (1993). *Management A.Global Perspective Tent Edition*. McGraw-Hill, Inc.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik*. PT. Buku Kita.